

Penanggulangan Bencana Kekeringan di Kabupaten Bojonegoro Dalam Perspektif *Good Governance*

Bagas Aditya Dwilucky¹, Calvin Edo Wahyudi²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
bagasadityadwilucky@gmail.com, kalvinedo.adne@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

Drought has become an annual disaster in Bojonegoro Regency. BPBD, which is a stakeholder responsible for disaster management efforts in the Bojonegoro Regency area, has collaborated with the private sector and civil society in overcoming this drought disaster. This study aims to describe the roles of three Good Governance actors, namely BPBD, the private sector, and also civil society in efforts to overcome drought in Bojonegoro Regency. This research uses descriptive qualitative research methods by obtaining data through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that drought disaster management in Bojonegoro Regency has been running quite well. This is evidenced by the 3 Good Governance actors who have played an active role in drought disaster management efforts in Bojonegoro Regency in the pre-disaster phase and during a disaster. However, in the pre-disaster phase so far only BPBD has played an active role. The private sector and civil society have not played an active role. This research suggests that the BPBD of Bojonegoro Regency should strengthen cooperation with the private sector and civil society so that drought disaster management in Bojonegoro Regency can run optimally.

Keywords: Drought, Good Governance, Disaster Mitigation

ABSTRAK

Bencana Kekeringan di Kabupaten Bojonegoro telah menjadi bencana tahunan yang melanda wilayah Kabupaten Bojonegoro. BPBD yang merupakan stakeholder yang bertanggung jawab terhadap upaya penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Bojonegoro telah menggandeng sektor swasta serta masyarakat sipil dalam penanggulangan bencana kekeringan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran dari tiga aktor Good Governance yaitu BPBD, sektor swasta, dan juga masyarakat sipil dalam upaya penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Bojonegoro. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Bojonegoro telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dari 3 aktor Good Governance yang telah berperan aktif dalam upaya penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Bojonegoro pada fase pra bencana dan pada saat terjadi bencana. Akan tetapi, pada fase pra bencana selama ini hanya BPBD yang sudah berperan aktif. Dari sektor swasta dan masyarakat sipil masih belum berperan aktif. Penelitian ini menyarankan kepada BPBD Kabupaten Bojonegoro agar dapat mempererat kerja sama dengan sektor swasta dan juga masyarakat sipil sehingga penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Bojonegoro dapat berjalan maksimal.

Kata kunci: Bencana, *Good Governance*, Penanggulangan Bencana

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi bencana yang relatif tinggi. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki potensi terjadinya bencana alam. Pemerintah mempunyai tanggung jawab besar dalam melindungi keselamatan warga negara dari ancaman bencana yang terjadi di Indonesia. Dalam prakteknya pemerintah telah membuat badan yang bertugas menanggulangi serta menangani bencana yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk tingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk tingkat Daerah.

Kekeringan merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang frekuensi kejadian di Indonesia masih cukup sering terjadi. Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang mengalami kejadian bencana kekeringan hampir setiap tahun. Bencana kekeringan di Kabupaten Bojonegoro umumnya terjadi pada saat musim kemarau. Menurunnya curah hujan merupakan faktor penyebab kurangnya ketersediaan air pada Kabupaten Bojonegoro dengan ditandai dengan berkurangnya debit air pada sungai, waduk, serta embung. Salah satu dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yaitu ancaman gagal panen bagi para petani yang ada di Bojonegoro. Dikarenakan mayoritas masyarakat bojonegoro bermatapencaharian sebagai petani.

BPBD Bojonegoro sebagai stakeholder yang bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana dalam wilayah Kabupaten Bojonegoro melakukan beberapa upaya dalam menanggulangi bencana kekeringan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Salah satu upaya yang dilakukan oleh BPBD Bojonegoro yaitu dengan melakukan pendistribusian air bersih ke daerah yang terdampak bencana kekeringan. Pihak swasta juga turut serta dalam upaya penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Bojonegoro dalam hal ini yaitu Pertamina EP Cepu (PEPC). Selain itu, ada juga organisasi masyarakat yaitu Lazismu yang ikut serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana kekeringan dengan memberikan bantuan air bersih.

Akan tetapi upaya ini dianggap belum maksimal karena upaya tersebut merupakan upaya penanggulangan jangka pendek dan kejadian bencana kekeringan di Kabupaten Bojonegoro masih terjadi setiap tahun. Kekeringan yang terus terjadi setiap tahun ini tentu menjadi sebuah permasalahan publik yang harus bisa diatasi oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Jika melihat dari penjelasan diatas, upaya penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Bojonegoro telah menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip teori good governance. Hal tersebut bisa dilihat dengan adanya hubungan dari tiga aktor yaitu Public Governance yang merujuk pada institusi pemerintah, Corporate Governance yang merujuk pada organisasi bisnis, dan Civil Society yang merujuk pada masyarakat madani yang saling bersinergi dalam menanggulangi bencana kekeringan di Kabupaten Bojonegoro. penerapan konsep Good Governance

dalam penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Bojonegoro dinilai dapat menjadi solusi yang efektif dan efisien bagi pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan “Bagaimana peran dari Pemerintah, Sektor Swasta, dan Masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Bojonegoro?”. Kajian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana peran dari tiga aktor *Good Governance* dalam upaya penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Bojonegoro.

KAJIAN LITERATUR

Good Governance

Good governance merupakan kerja sama dalam kesetaraan dan keseimbangan antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sangat penting bagi tata kelola pemerintahan yang baik, yang merupakan landasan dari nilai-nilai tata kelola pemerintahan modern (Meutia, 2017). Keberhasilan penerapan *Good Governance* juga dipengaruhi oleh kerja sama dan keterlibatan tiga aktor utama *Good Governance*: sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Sebagai sebuah paradigma baru dalam sistem politik, tata kelola pemerintahan yang efektif merupakan hal yang dicita-citakan dan diperjuangkan oleh setiap masyarakat (Warjiyati, 2018).

Menurut (Tomuka, 2013) gagasan saling ketergantungan dan interaksi antara berbagai pilar institusional di semua tingkat negara (legislatif, eksekutif, yudikatif, dan militer) dan sektor swasta (bisnis, lembaga keuangan) adalah fondasi dari *Good Governance*. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo dalam (Yenny, 2013) *good governance* merupakan tumbuhnya administrasi yang sering yang menjadikan fungsi pemerintah pusat semakin penting sehingga memunculkan agen perubahan sosial muncul di suatu negara berkembang.

Bencana

Bencana adalah peristiwa alam yang mengancam kehidupan manusia dan disebabkan oleh faktor alam atau manusia (Sopacua & Salakay, 2020). Menurut BNPB bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Menurut Etkin (2016) dalam (Heryana, 2020) Bencana dapat dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan penyebabnya: bencana alam, bencana teknologi, dan bencana yang disebabkan oleh manusia.

Penanggulangan Bencana

Salah satu aspek pembangunan nasional adalah manajemen bencana, yang terdiri dari sejumlah tindakan yang diambil untuk menangani bencana sebelum, selama, dan setelah bencana terjadi (Ramadhan & Matondang, 2016). Menurut (Fedryansyah et al., 2018) Penaggulangan bencana adalah serangkaian kegiatan baik sebelum, pada saat, maupun setelah terjadinya bencana yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, menghindari, dan memulihkan diri dari dampak bencana. Inisiatif pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan kebijakan pembangunan yang rawan bencana merupakan bagian dari proses penerapan penaggulangan bencana (Sitorus, 2022).

Banyak prinsip dan penanggulangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, antara lain: 1) Cepat dan Tepat, 2) Prioritas, 3) Koordinasi dan Keterpaduan, 4) Kemitraan, 5) Pemberdayaan. Adapun tahapan penaggulangan bencana menurut (Ramli, 2010 : 17) dalam (Manullang & Maesaroh, 2019) adalah prosedur sistematis yang digunakan dalam tiga (3) tahap, yaitu Tahap Pra-Bencana, Tahap Saat Terjadi Bencana, dan Tahap Pasca-Bencana untuk mengelola bencana secara tepat dan aman.

Bencana Kekeringan

Menurut Haji et al., (2016) kekeringan merupakan kejadian alam yang sering terjadi dan dapat menyebabkan bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Terdapat beberapa jenis kekeringan jika dilihat dari karakteristik dan dampak yang ditimbulkan menurut Wilhite (2010) dalam (Novreta Ersyi Darfia & Rahmalina, 2019) yaitu: 1) Kekeringan Metereologi, 2) Kekeringan Pertanian, 3) Kekeringan Hidrologi, 4) Kekeringan Sosial-Ekonomi.

Menurut Inarossy & P (2019) Kekeringan dapat menimbulkan dampak yang rumit dan berlangsung lama setelah kekeringan berakhir. Karena air merupakan kebutuhan dasar dan vital bagi semua makhluk hidup yang tidak dapat digantikan oleh sumber daya lain dan memiliki pengaruh yang signifikan dan bertahan lama, maka dampak kekeringan akan sangat terasa. Kekeringan dapat menyebabkan ketegangan sosial dan konflik yang meluas, termasuk permusuhan antara pemerintah dan pengguna air. Masyarakat yang tergolong kurang mampu akan lebih terpengaruh oleh kekeringan daripada kelompok masyarakat yang lebih mampu, yang memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya dari luar. Namun, kekeringan dapat memiliki dampak yang sangat negatif pada lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh

melalui wawancara terhadap 6 informan yang merupakan staff dan kepala seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro. Informan dipilih melalui metode purposive sampling yang berarti pemilihan informan dilakukan dengan sengaja dengan melakukan beberapa pertimbangan. Informan ini terdiri dari 3 Kepala Seksi dan 3 Staff dari masing-masing seksi yang ada di BPBD Kabupaten Bojonegoro. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui data-data yang ada seperti hasil penelitian, buku, data dari instansi, dan berita yang dimuat dalam media cetak maupun elektronik yang masih terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, metode yang dipakai dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Waktu penelitian ini berlangsung dari bulan Agustus sampai dengan bulan November. Lokasi penelitian ini yaitu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model analisis data dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 12-14) dalam (Wanto, 2018) yang didalamnya terdapat pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini akan dipaparkan dengan mendeskripsikan dan mengkaji hasil dari pengumpulan informasi serta temuan-temuan yang ada di lapangan selama dilakukannya penelitian dengan mengacu pada fokus daripada penelitian. Pemaparan dari hasil penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah diawal yakni untuk mengetahui bagaimana peran dari sektor pemerintah, sektor swasta, dan *civil society* dalam penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Bojonegoro dengan mengacu pada fokus penelitian berdasarkan pentingnya kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara 3 aktor *Good Governance* menurut (Meutia, 2017) yang mencakup sektor pemerintah, sektor swasta, dan *civil society*.

Peran BPBD

a) Pra Bencana

BPBD Bersama dengan instansi terkait seperti PDAM melakukan langkah antisipasi, mitigasi, dan siap siaga untuk mencegah agar kekeringan tidak terjadi di daerah bojonegoro dan sekitarnya. Pada tahap pra bencana BPBD melakukan asesmen. Menurut Nana Sudjana (1990: 3) dalam (Wahyudi, 2012) proses menetapkan atau memutuskan nilai suatu objek berdasarkan standar yang telah ditentukan disebut asesmen. Tahap ini digunakan untuk mengukur, menganalisis, dan memahami sejauh mana suatu objek atau subjek mencapai tujuan, kriteria, atau standar tertentu. Dengan ini BPBD dapat lebih mudah untuk berkomunikasi dengan OPD terkait jika sudah memiliki asesmen yang jelas.

BPBD selaku perangkat pemerintah juga melakukan koordinasi dengan PDAM untuk memastikan bahwa setiap daerah yang memiliki potensi untuk

terdampak kekeringan sudah terpasang pipanisasi, jika belum terdapat pipanisasi di daerah tersebut maka BPBD akan mengirimkan bantuan support air bersih lebih awal. Setelah melakukan mitigasi dengan memastikan daerah tersebut sudah terpasang pipanisasi atau belum, maka BPBD selanjutnya hanya perlu siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya kekeringan, jika terdapat laporan dari perangkat desa maka BPBD harus siap untuk turun dan berkoordinasi membantu masalah kekeringan yang mungkin terjadi di daerah tersebut.

b) Saat Terjadi Bencana

Pada tahap saat bencana terjadi maka penanganan yang dilakukan berbeda dengan saat pra bencana. Berdasarkan data yang sudah didapatkan, penanganan bencana pada saat sedang terjadi perlu dilakukan penanganan yang lebih intens. Langkah tersebut adalah komunikasi dan antisipasi yang dilakukan BPBD. Komunikasi dilakukan berkala untuk mengetahui seberapa besar kekeringan yang terjadi di sebuah daerah, komunikasi ini melibatkan banyak pihak.

BPBD Bersama dengan pihak swasta dan LSM berkolaborasi untuk mengatasi bencana kekeringan di Kabupaten Bojonegoro. Menurut Tadjudin dalam (Dorisman et al., 2021) menetapkan bahwa kolaborasi berkaitan dengan tugas berat untuk mengajak dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam mengelola sumber daya yang sama. Dengan ini maka kekeringan akan lebih mudah diatasi karena kolaborasi satu sama lain yang baik. Upaya penanggulangan yang dilakukan BPBD pada saat terjadi bencana kekeringan adalah dengan melakukan dropping support air melalui bantuan pemerintah daerah yang terkena dampak dari kekeringan yang sedang terjadi, support air ini berfungsi sebagai shortcut untuk mengatasi kekeringan yang terjadi.

c) Pasca Bencana

Penanganan pasca bencana yang dilakukan oleh BPBD terbagi menjadi dua, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi yang keduanya memiliki keterkaitan yang saling mendukung. Menurut (Sigarlaki et al., 2017) Koordinasi antara instansi/lembaga terkait di tingkat pusat dan daerah diperlukan untuk melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah memperbaiki fasilitas yang rusak akibat bencana, mengembalikan fungsi dan wujudnya seperti sediakala. Sedangkan untuk rekonstruksi adalah tindakan lanjutan setelah rehabilitasi untuk meningkatkan fungsi serta daya tahan fasilitas agar tidak rusak saat nanti ada bencana melanda. Dalam prakteknya rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak BPBD yaitu seperti melakukan monitoring terkait sarana dan prasarana yang digunakan dalam penanggulangan bencana kekeringan.

Pembahasan berisi hasil-hasil temuan penelitian dan pembahasannya. Tuliskan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan harus ditunjang oleh data-data yang memadai. Hasil penelitian dan

temuan harus menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian bagian pendahuluan. Subjudul pada pembahasan ditulis tanpa menggunakan nomor.

Peran Sektor Swasta

a) Pra Bencana

Selain BPBD, pihak swasta juga memiliki peran penting dalam penanganan pra bencana, biasanya pihak swasta mengalokasikan sumber daya keuangan guna mendukung persiapan sebelum terjadinya bencana. Pihak swasta dalam pra bencana kekeringan di Kabupaten Bojonegoro berperan dalam hal koordinasi dengan BPBD terkait daerah mana saja yang berpotensi mengalami kekeringan. Menurut Mooney dan Reiley dalam (Ambarwati, 2018), Koordinasi adalah induk dari banyak konsep lainnya, terutama dalam hal memastikan kelancaran pelaksanaan berbagai fungsi yang saling berhubungan di dalam organisasi. Koordinasi yang dilakukan antara sektor swasta dengan BPBD terkait kemitraan dalam rangka usaha-usaha persiapan sebelum terjadinya bencana.

b) Saat Terjadi Bencana

Dalam upaya kolaborasi yang dilakukan pemerintah dengan sektor swasta pada penanggulangan bencana kekeringan di Bojonegoro, pemerintah dalam hal ini diwakili oleh BPBD melakukan koordinasi apabila ada dari sektor usaha atau sektor swasta yang ingin menawarkan bantuan dalam hal penanggulangan bencana kekeringan atau yang bisa disebut CSR. Menurut UUPT 2007 dalam (Marnelly, 2012) Pasal 1 butir 3 mendefinisikan CSR sebagai "komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya". Dalam prakteknya, CSR yang dilakukan oleh sektor swasta dalam penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Bojonegoro salah satunya yaitu dari Pertamina EP Cepu. Mereka membangun sumur bor yang bisa membantu pasokan air ke wilayah di Bojonegoro yang mengalami kekeringan. CSR yang dilakukan oleh Pertamina EP Cepu ini tentu sangat membantu bagi masyarakat yang terdampak bencana kekeringan.

c) Pasca Bencana

Di Bojonegoro, perusahaan swasta telah menunjukkan komitmennya untuk memberikan dukungan dan bantuan dalam situasi bencana, termasuk kekeringan. Mereka berperan aktif dalam kolaborasi untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan penanggulangan bencana. Namun, peran dari sektor swasta dalam pasca bencana masih kurang. Menurut Riyadi (2002:138) dalam (Brigette Lantaeda et al., 2017) Definisi peran dapat diartikan sebagai sikap dan konsep peran partai oposisi sosial. Dalam hal ini sektor swasta belum melakukan pendampingan seperti dengan apa yang diharapkan oleh BPBD. Dikarenakan selama ini fokus dari sektor swasta pada tahap membantu pemenuhan air bersih pada saat terjadi bencana.

Peran *Civil Society*

a) Pra Bencana

Peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam mengembangkan rencana persiapan bencana dan mitigasi adalah sangat penting. Mitigasi menurut (Dennis F. Niode et al., 2016) adalah tahap pertama dari penanggulangan bencana alam untuk mengurangi dan meminimalkan dampak bencana. Hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh pihak swasta, LSM juga dapat berkontribusi dalam penanganan pra bencana kekeringan di Bojonegoro. Seperti relawan yang bersedia membantu dalam memantau situasi kekeringan dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. LSM juga dapat melakukan advokasi untuk meningkatkan kesadaran mengenai risiko kekeringan dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang langkah-langkah yang perlu diambil. Mereka dapat memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai bagaimana menghadapi bencana, termasuk dalam pengelolaan sumber daya air.

b) Saat Terjadi Bencana

Ikut andil masyarakat sipil pada saat terjadi bencana yaitu masyarakat yang terdampak kekeringan melakukan pelaporan kepada BPBD terkait daerah yang sudah mengalami kekeringan. Selain itu, ada juga dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang turut memberikan bantuan berupa droping air bersih ke daerah yang mengalami kekeringan seperti yang dilakukan Lazismu. LSM menurut (Herdiansah & Randi, 2016) yaitu organisasi yang didirikan secara sukarela oleh individu atau organisasi dengan tujuan untuk mendukung dan menopang kegiatan atau kepentingan publik tanpa maksud mencari keuntungan. LSM yang hendak ikut serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana kekeringan harus melakukan koordinasi dengan BPBD agar bantuan yang diberikan dapat merata ke semua daerah yang mengalami kekeringan.

c) Pasca Bencana

Peran dari Civil Society pada fase pasca bencana masih minim. Kegiatan pasca bencana menurut (Fedryansyah et al., 2018) merupakan kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Namun sampai saat ini belum dilakukannya pendampingan berkaitan dengan kegiatan pasca bencana dari LSM yang dilakukan kepada masyarakat setelah mengalami bencana kekeringan. Sama halnya dengan sektor swasta, dari Civil Society atau dalam hal ini LSM masih berfokus pada bantuan yang diberikan pada saat terjadi bencana kekeringan. Bantuan yang diberikan yaitu berupa pendistribusian air bersih ke daerah yang mengalami kekeringan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Upaya penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Bojonegoro sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip Good Governance. Peran dari BPBD sudah terlihat dalam 3 fase penanggulangan bencana. Peran dari sektor swasta dan masyarakat sipil sudah baik dilakukan pada fase Pra Bencana dan Pada Saat Terjadi Bencana. Akan tetapi, pada fase Pasca Bencana dari sektor swasta maupun masyarakat sipil masih belum ikut berperan.

Agar upaya penanggulangan bencana kekeringan dapat berjalan maksimal, maka disarankan supaya melakukan kerja sama yang lebih erat antara BPBD, pihak swasta, dan Civil Society dalam merencanakan dan melaksanakan upaya penanggulangan bencana kekeringan. Selain itu, Pihak swasta serta Civil Society dapat lebih aktif dalam mendukung upaya penanggulangan bencana kekeringan. Termasuk dalam fase pasca bencana kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, A. (Universitas H. (2018). *Perilaku Dan Teori Organisasi*. <http://himia.umj.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/PerilakuDanTeoriOrganisasi.pdf>
- Brigette Lantaeda, S., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 04(048), 243.
- Dennis F. Niode, Yaulie D.Y. Rindengan, & Stanley D.S. Karouw. (2016). Geographical Information System (GIS) untuk Mitigasi Bencana Alam Banjir di Kota Manado. *Jurnal Teknik Elektro Dan Komputer*, 5(2), 14–20. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom/article/view/11646>
- Dorisman, A., Suradji, A., & Setiawan, R. (2021). KOLABORASI ANTAR STAKEHOLDER DALAM PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(1), 70–83.
- Fedryansyah, M., Pancasilawan, R., & Ishartono, I. (2018). Penganggulangan Bencana Di Masyarakat Desa Studi Di Desa Cipacing, Desa Cileles, Dan Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. *Social Work Journal*, 8(1), 11–16. <https://doi.org/10.24198/share.v8i1.15961>
- Herdiansah, A. G., & Randi. (2016). PERAN ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM MENOPANG PEMBANGUNAN DI INDONESIA. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 1(1). <https://doi.org/10.35800/jjs.v1i1.1047>
- Marnelly, T. R. (2012). CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR): Tinjauan Teori

dan Praktek di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 3(1), 49–59.

Meutia, I. F. (2017). *REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK*.

Sigarlaki, N. T., Sambiran, S., & Lambey, T. (2017). IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI KORBAN BANJIR DI KOTA MANADO (Studi di Kecamatan Paal Dua). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

Wahyudi. (2012). Assesment Pembelajaran Berbasis Portofolio di Sekolah. *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan*, 2(1), 288–297. <https://doi.org/10.26418/jvip.v2i1.370>

Wanto, A. H. (2018). Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 39. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p39-43>